BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi perlindungan korban kekerasan seksual berbasis gender online di UPTD PPA Sidoarjo sudah sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UPTD PPA kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan fungsi perlindungan mempunyai alur yaitu pertama tahap aduan yang memiliki dua jenis antara lain aduan langsung dan tidak langsung, kedua yakni asesmen konseling yang akan menentukan korban diberikan perlindungan sesuai yang dibutuhkan, ketiga terdapat 3 (tiga) jenis fasilitas yang diberikan yaitu rumah aman shelter, psikologi, psikososial, dan pelayanan medis, keempat terdapat pelayanan hukum dan kelima terdapat pelayanan non hukum.
2. Pelaksanaan perlindungan korban KBGO di UPTD PPA Sidoarjo memiliki beberapa kendala yakni belum adanya psikolog, selain itu belum adanya mekanisme penghapusan video asusila yang menjadi sebab trauma korban, terdapat sejumlah kasus yang belum bisa dilakukan proses persidangan dan masih banyak masyarakat sidoarjo yang belum paham atas edukasi seks dan pencegahan kekerasan seksual. Dari kendala-kendala tersebut penulis memberikan sebuah upaya optimalisasi

yang didasari oleh hak dan kebutuhan korban atas pelayanan UPTD PPA Sidoarjo yaitu, upaya pra-peradilan, adanya penghapusan konten pornografi, serta pentingnya psikolog dalam penyembuhan psikis dan edukasi sebagai tombak awal dalam pencegahan KBGO. Sehingga dalam pelaksanaannya perlindungan korban kekerasan seksual berbasis gender online menjadi lebih optimal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sidoarjo.

4.2 Saran

1. Penulis memberikan saran pada instansi agar UPTD PPA dalam menjalankan layanan yang diberikan, lebih baik mengoptimalkan akan hak korban atas layanan yang seharusnya diperoleh oleh korban, terutama dalam hal pendampingan hukum dan penghapusan konten bermuatan seksual. Bekerjasama dengan lembaga yang berwenang seperti kominfo dan kepolisian memudahkan UPTD PPA dalam menjalankan hak-hak korban tersebut.
2. Saran pada penulis berikutnya agar lebih mendalami dan mengkaji atas pendampingan hukum korban KBGO, karena di UPTD PPA sidoarjo mendapatkan hambatan sehingga dalam melayani hak-hak korban menjadi tidak optimal.